

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas pendidikan pada jalur sekolah pendidikan dasar dan menengah terus dilakukan melalui berbagai upaya. Hal itu selaras dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan hasil pendidikan. Upaya tersebut, meliputi peningkatan kualitas tenaga kependidikan seperti untuk guru melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan relevansi pendidikan dengan bidang keahlian mengajarnya, penataran-penataran bidang studi, pengadaan fasilitas belajar mengajar yang memadai. Demikian pula tenaga kependidikan lainnya seperti pengelola pendidikan, pustakawan, teknisi sumber belajar, dan pengawas sekolah. Fokus pengembangan tenaga kependidikan tersebut, erat kaitannya dengan posisi dan peranan yang strategis dalam pencapaian pendidikan di sekolah. Salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran dan fungsi strategis adalah pengawas, ia bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pendidikan di persekolahan.

Kimball Wiles (1995) dalam Piet A. Sahertian (2000; 25), mengemukakan bahwa pengawas berfungsi membantu (*assisisting*), memberi suport (*supporting*), dan mengajak (*sharing*).

Peter F.Olivia (1976:19-20), mengemukakan bahwa seorang pengawas dapat berperan sebagai dalam; (1) mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas guru dalam kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang studi

yang dibina guru, (2) memberikan bantuan pemecahan masalah yang dialami guru dalam pelaksanaan tugasnya (3) sebagai pimpinan kelompok guru dalam mengembangkan kurikulum, dan penyusunan materi pelajaran, (4) sebagai evaluator dalam menilai hasil dan proses belajar.

Peran dan fungsi pengawas ditinjau dari praktik lapangan, nampaknya mempunyai hubungan langsung dengan persekolahan yang menjadi binaannya. Sebagai gambaran penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah, jenis dan jenjang pendidikan SLTP/SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keadaan SLTP/SMU Negeri dan Swasta
di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat

NO	KAB/KOTA	SLTPN	SLTPS	JML	SMUN	SMUS	JML
1	Kab.Serang	52	47	99	11	23	34
2	Kab.Lebak	44	7	51	10	4	14
3	Kab.Pandeglang	40	4	44	7	5	12
4	Kab.Tangerang	52	209	261	17	79	96
5	Kab.Bekasi	51	115	166	11	50	61
6	Kab.Bogor	62	235	297	16	70	86
7	Kab.Sikabumi	51	44	95	9	13	22
8	Kab.Cianjur	52	29	81	9	16	25
9	Kab.Bandung	75	184	259	25	68	93
10	Kab.Garut	58	44	102	5	9	14
11	Kab.Tasikmalaya	76	46	122	14	26	40
12	Kab.Ciamis	78	11	89	14	13	27
13	Kab.Kuningan	47	8	55	13	6	19
14	Kab.Majalengka	46	2	48	11	4	15
15	Kab.Cirebon	44	53	97	11	20	31
16	Kab.Indramayu	84	49	133	10	25	35
17	Kab.Karawang	38	24	62	12	8	20
18	Kab.Subang	38	24	62	8	9	17
19	Kab.Purwakarta	26	6	32	5	7	12
20	Kab.Sumedang	56	15	71	11	10	21
21	Kodya Bandung	51	160	211	26	104	130
22	Kodya Bogor	17	67	84	8	36	44
23	Kodya Sukabumi	15	18	33	4	11	15
24	Kodya Cirebon	17	23	40	8	15	23
JUMLAH		1170	1424	2594	275	631	906

Sumber : Dokumentasi Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat (2000)

Tabel 1.1. menunjukkan penyebaran sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah umum, baik negeri maupun swasta yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, Propinsi Jawa Barat.

Sekolah merupakan institusi pelaksana penyelenggara pendidikan, dalam konteks administrasi pendidikan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, dalam pencapaian tujuan pendidikan diperlukan pengelolaan berbagai aspek sesuai dengan fungsi-fungsi administrasi. Salah satu indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar di SLTP dan SMU digambarkan oleh nilai evaluasi belajar tahap akhir. Berdasarkan statistika rata-rata (dalam klasifikasi SLTP/SMU Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, 1999), menginformasikan bahwa NEM SLTP tahun 1998/1999 diklasifikasikan dengan; *baik sekali* (kode A, rentang rata-rata $\geq 7,50$); *baik* (kode B, rentang $6,50 \leq \text{rata-rata} \leq 7,49$); *sedang* (kode C, rentang $5,5 \leq \text{rata-rata} \leq 6,49$); *kurang* (kode D, rentang $4,50 \leq \text{rata-rata} \leq 5,49$); dan *kurang sekali* (kode E, $\text{rata-rata} \leq 4,49$). Adapun gambaran nyata kualifikasi berdasarkan keberhasilan hal itu dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2. dan Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.2
Klasifikasi SLTP Berdasarkan Rata-Rata NEM Tahun 1998/1999
Di Lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat

Tahun 1998/1999							
NO	KRITERIA	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	%
		JML	%	JML	%		
1	BAIK SEKALI	-	-	2	0.08	2	0.08
2	BAIK	27	1.07	64	2.53	91	3.60
3	SEDANG	477	18.87	244	9.65	721	28.52
4	KURANG	632	25.00	1.082	42.80	1.714	67.80
5	KURANG SEKALI	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.136		1.392		2.528	100.00

Sumber : Dokumnetasi Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat (2000)

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata NEM pada tahun 1998/1999 tampak pada kisaran kurang ($4,5 \leq \text{rata-rata} \leq 5,49$), mencapai 67,80 persen.

Tabel 1.3
Klasifikasi SMU Berdasarkan Rata-Rata NEM Tahun 1998/1999
Di Lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat

Tahun 1998/1999						
NO	KRITERIA	NEGERI		SWASTA		JUMLAH
		JML	%	JML	%	
1	BAIK SEKALI	-	-	-	-	-
2	BAIK	-	-	6	0.77	6
3	SEDANG	20	2.55	16	2.04	36
4	KURANG	69	8.81	33	4.21	102
5	KURANG SEKALI	202	25.80	437	55.81	639
	JUMLAH	291		492		783
						100.00

Sumber : Diolah Dari Dokumentasi Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat (2000)

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata NEM pada tahun 1998/1999 tampak pada kisaran kurang ($4,5 \leq \text{rata-rata} \leq 5,49$), mencapai 13,03 persen dan kurang sekali mencapai 81,61 persen.

Kedua tabel tersebut, memberikan gambaran bahwa hasil belajar mengajar berdasarkan NEM, baik pada tingkat SLTP maupun SMU di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat masih belum mencapai angka yang memadai sesuai harapan. Angka yang memadai diasumsikan berdasarkan skala penilaian harus mempunyai angka prediksi kemampuan pencapaian minimal (60). Oleh sebab itu, kedua tabel dapat kita tafsirkan pencapaian proses belajar mengajar di SLTP dan SLTA dan SMU menggambarkan ketercapaian masih di bawah 50 % dari skala maksimal.

Upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan yang salah satu faktornya adalah proses pembelajaran di setiap kelas pada setiap jenjang persekolahan. Dipandang dari administrasi pendidikan, paling tidak ada tiga komponen fungsional manajerial strategis seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang

berpengaruh atas kinerja pendidikan. Dari ketiga komponen manajerial, selama ini yang diduga masih kurang mendapat perhatian adalah pengawasan. Fungsi pengawasan, sangat strategis dalam pencapaian tujuan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan (Engkoswara, 1987).

Persoalan pengawasan pendidikan yang berkaitan dengan persekolahan sangat kompleks. Kompleksitas tersebut, menyangkut berbagai faktor seperti kuantifikasi (jumlah) dan kualifikasi (kualitas) tenaga pengawas, fasilitas dan pendukungnya, serta dana operasionalnya. Sebagai gambaran nyata berkenaan dengan tenaga pengawas, dibandingkan dengan jumlah sekolah baik SLTP maupun SMU, dapat ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Perbandingan Sekolah Dengan Pengawas
di Lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat

NO	KAB/KODYA	SLTP Ng	SLTP Sws	JML	SMU Ng	SMU Sws	JML	JML TOTAL	JUMLAH PENGAWAS	RASIO
1	Kb.Serang	52	47	99	11	23	34	133	1	1 : 133
2	Kb.Legal	44	7	51	10	4	14	65	2	1 : 32.5
2	Kb.Pandeglang	40	4	44	7	5	12	56	2	1 : 28
3	Kb.Tangerang	52	209	261	17	79	96	357	6	1 : 59.5
4	Kb.Bekasi	51	115	166	11	50	61	227	6	1 : 37.8
5	Kb.Bogor	62	235	297	16	70	86	383	6	1 : 63.8
6	Kb.Sukabumi	51	44	95	9	13	22	118	2	1 : 59
7	Kb.Cianjur	52	29	81	9	16	25	106	5	1 : 21.2
8	Kb.Bandung	75	184	259	25	68	93	352	10	1 : 35.2
9	Kb.Garut	58	44	102	5	9	14	116	4	1 : 29
10	Kb.Tasikmalaya	76	46	122	14	26	40	166	4	1 : 41.5
11	Kb.Ciamis	78	11	89	14	13	27	116	3	1 : 38.7
12	Kb.Kuningan	47	6	53	13	6	19	74	3	1 : 24.7
13	Kb.Majalengka	46	2	48	11	4	15	63	2	1 : 31.5
14	Kb.Cirebon	44	53	97	11	20	31	128	2	1 : 64
15	Kb.Indramayu	84	49	133	10	25	35	168	2	1 : 84
16	Kb.Karawang	38	24	62	12	8	20	88	3	1 : 29.3
17	Kb.Subang	38	24	62	8	9	17	79	1	1 : 79
18	Kb.Purwakarta	26	6	32	5	7	12	44	2	1 : 22
19	Kb.Sumedang	56	15	71	11	10	21	92	2	1 : 46
20	Kb.Purwakarta	26	6	32	5	7	12	44	2	1 : 22
21	Ky.Bandung	51	160	211	26	104	130	231	4	1 : 57.8
22	Ky.Bogor	17	67	84	8	36	44	128	2	1 : 64
23	Ky.Sukabumi	15	18	33	4	11	15	48	1	1 : 48
24	Ky.Cirebon	17	23	40	8	15	23	63	2	1 : 32.5
	Jumlah	1170	1424	2594	275	631	906	3500	75	1 : 46.67

Sumber : Diolah dari dokumentasi Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat (1999)

Tabel 1.4. memberikan informasi kurangnya sumber daya tenaga pengawas sekolah yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat. Dipandang dari rasio antara jumlah sekolah (SLTP dan SMU Negeri dan Swasta, 1: 46) atau sama dengan seorang pengawas melayani 46 sekolah, tampak tidak proposional (seharusnya 1:10), belum lagi jika dipandang dari kualifikasi (kemampuan profesional).

Posisi pengawas menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.118/1996, mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Bab 1 Pasal 1 dan 2 yang isinya :

- (1) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan sekolah dasar serta pendidikan menengah.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai bidang pengawasan sebagai berikut:
 - (a) Bidang pengawasan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/ Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA
 - (b) Bidang pengawasan Rumpun Mata Pelajaran
 - (c) Bidang Pendidikan Luar Biasa
 - (d) Bidang Pengawasan Bimbingan dan Konseling

Uraian dari keputusan tersebut, merupakan suatu penegasan dari Kepmen Depdikbud No.0364/P/1988 tentang perincian tugas satuan organisasi, Pasal 81, Ayat 1 sampai dengan Ayat 13 yang berisikan :

- (1) menyusun rencana kegiatan tahunan pengawas jenis sekolah yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis sekolah agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kuantitas sarana sekolah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- (5) mengendalikan termasuk membimbing tata usaha sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perkantoran, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama sekolah, dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat antara lain dengan Pemerintah Daerah, dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan;
- (7) menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu;
- (8) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekolah, antara lain kalender pendidikan, penerimaan murid baru, mutasi murid, evaluasi belajar tahap akhir, pembagian rapor, dan kegiatan insidental lainnya;
- (9) menilai pemanfaatan sarana sekolah;
- (10) menilai efisiensi dan efektivitas tata usaha sekolah;
- (11) menilai hubungan sekolah dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan;
- (12) mempersiapkan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala SMTP/SMTA/ SLB;
- (13) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk perhatian Kepala Bidang yang relevan.

Isi dari keputusan tersebut, tampak bahwa posisi legal seorang pengawas dalam proses dan penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah sangat strategis. Oleh sebab itu, seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab, harus mempunyai beberapa kriteria yang sesuai dengan peran dan fungsi pengawasan. Sumber daya pengawas di lingkungan persekolahan tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan secara keseluruhan.

Pengawas mempunyai kesamaan makna dengan supervisor, walaupun pada penekanan tertentu mempunyai perbedaan. Namun demikian, dalam beberapa

konsep dapat dijadikan suatu landasan berpikir dalam menelaah pengawasan pendidikan.

Ben Haris (1975:10-11) mendefinsikan supervisi sebagai berikut:

What school personnel do with adults and things to maintain or change the school operation in ways that directly influence the teaching processess employed to promote pupil learning. Supervision is higly instruction-related but not higly pupil-related. Supervision is a major function of the school operation not a task or a specific job or a set of techiniques. Supervision of instruction is directed toward maintaining and improving the teaching-learning processes of the school.

Pandangan yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa supervisor mempunyai peranan, fungsi yang kompleks dari sistem pendidikan. Seorang supervisor, dituntut mampu memberikan pelayanan, bimbingan dan pemecahan masalah, serta pemberdayaan sumber-sumber yang dihadapi oleh pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Namun demikian, seperti yang dikemukakan terdahulu kondisi pengawas SLTP dan SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dalam kondisi kritis baik dilihat dari kuantitas (rasio antara pengawas dengan sekolah yang dibinanya), maupun kualitas (kualifikasi profesional). Berdasarkan studi pendahuluan dilapangan, memberikan informasi bahwa mekanisme rekrutment pengawas, sebelum berlakunya keputusan bersama Mendikbud dengan Kepala BAKN No.0322/O/1996 dan No.38/1996 belum dilakukan secara sistematis.

Bertolak dari uraian tesebut, terdapat suatu kondisi yang saling terkait dalam suatu keadaan. Dilihat dari jumlah persekolahan, (SLTP dan SMU) yang tidak sebanding dengan jumlah pengawas, di lain pihak gambaran kualitas perolehan

hasil belajar akhir belum menunjukkan nilai yang sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, menarik perhatian untuk dilakukan suatu penelitian, yang permasalahannya, bertumpu pada pengembangan personil pengawas pada tingkat SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

B. Perumusan Masalah

Dalam konprensi tenaga kependidikan yang diselenggarakan Bappenas dan Bank Dunia di Jakarta Tahun 1999, dikemukakan sinyalemen mengenai kondisi pengawas sekolah saat ini, “Pengawas pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk memacu mutu pendidikan, harus mengutamakan aspek-aspek akademik dari pada administratif (sebagaimana yang berlaku selama ini). Oleh sebab itu, jabatan sebagai pengawas/penilik harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar berkemampuan dan menguasai bidang tugasnya, memiliki latar belakang yang sesuai, serta disiapkan secara sistematis melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Harus dihindari jabatan pengawas sekolah diduduki oleh orang-orang yang tiak layak atau hanya menunggu masa pensiun”

Sinyelemen tersebut, nampaknya melihat ada indikasi penyimpangan peran dan fungsi pengawas ditinjau dari tugas utamanya. Hal itu sejalan dengan temuan pengamat pengawas senior di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat, yang mengemukakan :

- (a) Tempat tinggal pengawas jauh SLTP dan SMU dari wilayah atau lokasi sekolah yang diawasinya
- (b) Jumlah pengawas bidang studi tidak sebanding dengan jumlah ideal yang seharusnya 1 : 15
- (c) Satu orang pengawas membina sampai 50 Kepala Sekolah (SLTP/SMU)
- (d) Banyak pengawas yang tidak berpengalaman dalam persekolahan

- (e) Tidak membuat laporan hasil supervisi klinis
- (f) Pelaksanaan pengawasan bersifat kolektif beberapa sekolah dalam satu kali supervisi administratif

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan pengawas sudah selayaknya memperoleh perhatian sesuai dengan peran dan fungsinya. Peran dan fungsi pengawas tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan program pendidikan, termasuk pelaksanaan kurikulum, mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas, pelurusan penyimpangan, mengadakan perbaikan, dan peningkatan kemampuan profesional guru. Konsekuensi peran dan fungsi pengawas, maka dalam penetapan seseorang untuk diberi wewenang sebagai pengawas diperlukan kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntutan.

Dengan demikian dalam penelitian ini, diajukan perumusan masalahnya sebagai berikut:

“Bagaimana manajemen pengembangan kemampuan profesional pengawas Sekolah Menengah Umum (SMU) di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat”

Permasalahan manajemen pengembangan personil pengawas sekolah menengah umum tersebut, selanjutnya dirinci menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola perencanaan pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat ?

Pertanyaan tersebut dibatasi pada hal-hal berikut;

- (a) Kebijakan perencanaan pengembangan;
- (b) Pola dan strategi pengembangan ;
- (c) Isi dan sasaran perencanaan pengembangan;

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan personil pengawas SMU ?

Pertanyaan tersebut; dibatasi pada hal-hal berikut:

- (a) Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta penilaian personil pengawas;
- (b) Pelaksanaan pengembangan karier personil pengawas;
- (c) Program pembinaan dan pengembangan karier personil pengawas;
- (d) Sasaran pembinaan dan pengembangan karier personil pengawas;

3. Bagaimana pola penilaian pengembangan pengawas SMU ?

Pertanyaan tersebut, dibatasi pada hal-hal berikut:

- (a) Prosedur penilaian pengembangan pengawas;
- (b) Kriteria penilaian pengembangan pengawas;
- (c) Pelaksanaan penilaian pengembangan pengawas;
- (d) Hasil penilaian pengembangan pengawas;
- (e) Tindak lanjut hasil pengembangan pengawas;
- (f) Implikasi penilaian terhadap kompensasi yang diterima pengawas SMU;

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif berkenaan dengan strategi pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan tujuan umum di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

- (1) Pola perencanaan pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat
- (2) Pelaksanaan pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat
- (3) Pola penilaian pengembangan pengawas SMU di lingkungan Kantor Dinas Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, dapat ditinjau dari dua aspek yaitu teoretis dan praktis. Aspek teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam mengembangkan teori sumber daya manusia pendidikan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

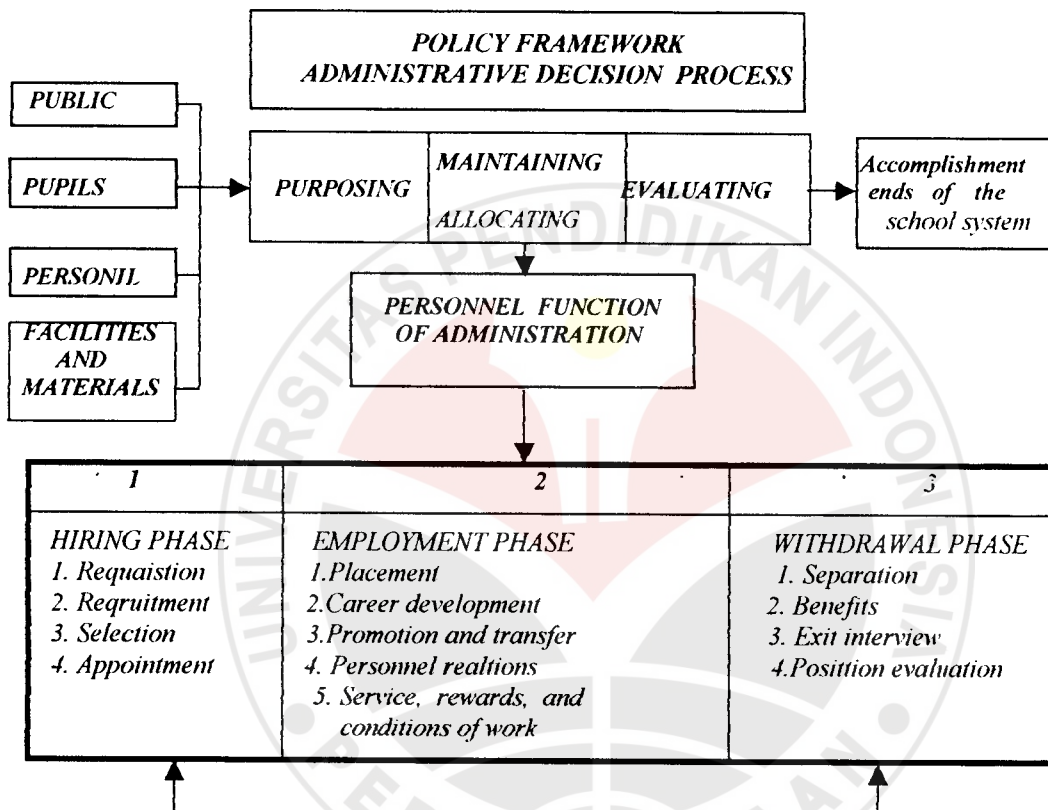
- (1) Kajian peminat terhadap sumber daya pendidikan, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat;
- (2) Bahan masukan bagi pihak berwenang dalam menetapkan pengembangan personil pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat;

E Fokus Telaahan Penelitian

Administrasi pendidikan merupakan bagian integral dari aktivitas penyelenggaraan pendidikan persekolahan. Wilayah kerja administrasi pendidikan meliputi

penataan, pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya internal dan eksternal, serta fasilitas yang diperlukan.

R.Oliver Gibson (1965) menggambarkan hubungan antara personil dengan administrasi secara umum sebagai berikut:



Gambar 1.1. Hubungan Antara Personil Dengan Administrasi

Gambar tersebut, menunjukkan bahwa kerangka kebijakan proses administrasi khususnya hubungan personil dalam ruang lingkup administrasi pendidikan.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Engkoswara (1987) bahwa wilayah administrasi pendidikan berkenaan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertumpu pada pengembangan personil

pengawas sesuai dengan peran dan fungsi. Dipandang dari keilmuan, penelitian administrasi pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
ELEMENTA IN A PROGRAM OF PREPARATION
FOR A PERSONNEL ADMINISTRATOR

<i>Areas of Administration</i>	<i>Areas of Learning</i>		
	<i>Knowledge and Understanding</i>	<i>Attitudes</i>	<i>Skills</i>
<i>General Administration</i>	<i>Study of administrative activity in various institutions: public, business, industry, military, etc, including the personnel function</i>		
<i>Schools Administration</i>	<i>Study of administration of schools</i>		
<i>Personnel Administration</i>	<i>Study of administration of personnel services</i>		

Sumber : Oliver R.Gibson, 1965)

Tabel tersebut, menunjukkan komponen-komponen yang dapat dikembangkan, yang salah satunya berkaitan dengan personil yakni pengawas.

F. Paradigma Penelitian

Bogdan and Biklen (1992:23) mendefinisikan bahwa, *Paridgm is a loose collection of logically health to gether assumtion, concept or propotions the orient thingking or research*. Paradigma juga memiliki pengertian sebagai suatu (1) model dalam teori ilmu pengetahuan, (2) kerangka berpikir. Paradigma dalam penelitian ini, merujuk pada kerangka pemikiran yang didasarkan pada posisi masalah untuk mengarahkan penelitian. Paradigma sebagai suatu kesatuan persepsi, gagasan, konsep, dan nilai-nilai yang menentukan pola berpikir dan berperilaku manusia dalam waktu dan tempat tertentu. Sedangkan jika dihubungkan dengan penelitian, paradigma dapat diartikan sebagai kerangka konseptual dalam melihat persoalan secara terstruktur. Oleh sebab itu paradigma merupakan pernyataan perspektif

teoretis yang akan menggiring dan menjadi panduan dalam aktivitas penemuan, juga merupakan representasi, model suatu teori, idea dan prinsip.

Dengan demikian paradigma penelitian yaitu suatu model yang dijadikan suatu model acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Oleh sebab itu, paradigma penelitian dalam penelitian yang diajukan bertolak dari adanya upaya pemerintah (Depdiknas) khususnya kebijakan pengembangan pengawas SLTP dan SLTA melalui Keputusan Bersama antara Mendikbud dan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara No.0332/O/1996 dan Nomor 38/1996, mengenai “petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Pengawas SLTP dan SLTA sejak berlakunya SK Bersama tersebut, posisinya menjadi lebih kuat sebagai pejabat fungsional di lingkungan Depdiknas.

Berdasarkan konsep-konsep yang dijadikan bahan pengembangan dalam paradigma penelitian ini dapat diajukan beberapa pemikiran secara sistematis berikut: Pertama, bahwa suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan berkenaan dengan penetapan pengawas sebagai jabatan fungsional dianalisis secara deskripsi, apakah keputusan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, siapa yang melaksanakan dan menilainya, sehingga dapat diperoleh informasi implementasi kebijakan tersebut. Tahap kedua melihat bagaimana proses pengembangan pengawas. Tahap ketiga menilai seluruh aktivitas aktual ditinjau dari konsep kebijakan yang berlaku. Paradigma penelitian dapat ditunjukkan pada gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Paradigma Penelitian

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini, tidak bermaksud untuk mengungkapkan hubungan atau pengaruh antar variabel melalui studi korelasi atau regresi untuk menguji hipotesis. Rumusan masalah dalam penelitian ini menuntut peneliti untuk melakukan eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui komunikasi yang intensif dengan sumber data. Dengan kata lain fokus kajian penelitian ini yaitu perilaku manusia dalam organisasi. Metode yang dianggap tepat untuk penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan, untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam situasi.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini, meliputi karakteristik yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap pengembangan personil pengawas di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat.

Sampel tidak merupakan acak, atau strata, melainkan sampel bertujuan (*purposive sampling*), adapun ciri-ciri sampel bertujuan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) rancangan sampel yang muncul, tidak dapat ditarik terlebih dahulu; (2) penentuan sampel secara berurutan sesuai dengan kebutuhan; (3) penyesuaian berkelanjutan dari sampel; dan (4) pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan (Moleong, 1990). Pengambilan sampel menggunakan teknik

“bola salju” atau *snowball sampling technique* (Bogdan & Biklen, 1982; Moleong, 1990).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Data awal berkenaan dengan jumlah, kualifikasi dan distribusi wilayah tugas dari pengawas SMU yang tersebar di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat..
- (2) Data tentang mekanisme pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- (3) Data pihak atau pejabat yang berwenang dengan pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- (4) Data tentang proses pengembangan personil pengawas SMU di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan angket, hal itu disesuaikan dengan kebutuhan informasi lapangan. Bogdan dan Biklen (1982:73-74) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu penelitian naturalistik atau kualitatif tergantung kepada ketelitian dan kelengkapan catatan lapangan (*field notes*) yang disusun peneliti. Untuk penelitian ini dilengkapi dengan buku catatan, tape recorder, dan kamera. Adapun instrumen penelitian, penulis mencoba merekonstruksi sendiri sebagai acuan di lapangan.

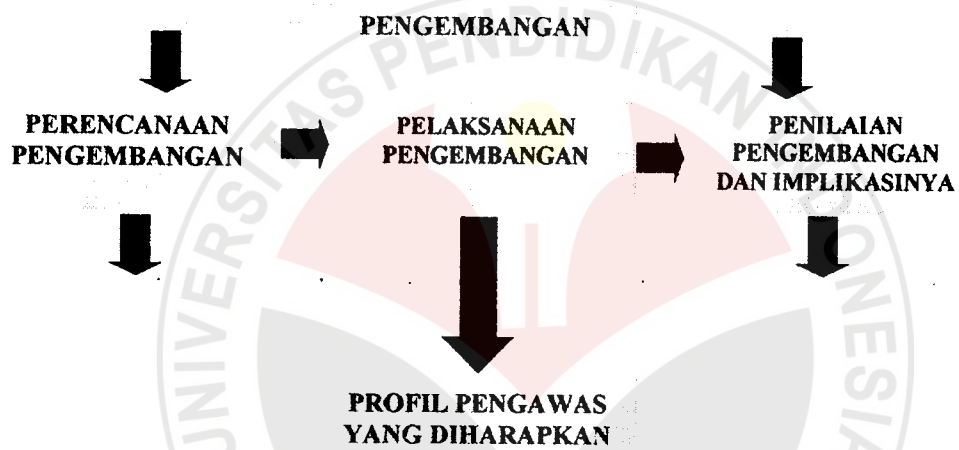
Langkah-langkah penelitian naturalistik meliputi tiga tahap, yaitu; tahap pertama (orientasi), merupakan penelitian awal untuk memperoleh gambaran permasalahan yang lebih lengkap guna memantapkan fokus penelitian. Setelah berkonsultasi dengan pembimbing dan disain penelitian telah disetujui, penulis

melakukan studi pendahuluan dengan melakukan serangkaian wawancara, observasi dan menyebarkan angket. Tahap kedua (eksplorasi), dilakukan penelitian sebenarnya sesuai dengan permasalahan yang diajukan, hal ini dilakukan setelah persyaratan yang dijadikan landasan lapangan dipenuhi. Tahap ketiga (member chek) yaitu memverifikasi dengan mengecek keabsahan atau validitas data. Jadi tahap ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran informasi-informasi yang telah dikumpulkan, agar hasil penelitian dapat dipercaya.

Prosedur analisis data dilakukan atas dasar; (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi data, dilakukan dengan menelaah kembali seluruh catatan lapangan dan studi dokumentasi, serta wawancara. Telaah ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang penting berkenaan dengan fokus penelitian yakni aktivitas pengembangan personil pengawas. Display data, merupakan kegiatan mensistematiskan pokok-pokok informasi sesuai dengan tema dan polanya, pola yang nampak ditarik suatu kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna tertentu. Adapun verifikasi data merupakan member chek atau triangulasi, yakni proses verifikasi kesimpulan berlangsung selama dan sesudah data dikumpulkan.

Selanjutnya ditunjukkan alur berpikir eksplorasi penelitian dapat ditunjukkan pada gambar 1.3. Tahapan tersebut selaras dengan permasalahan, perumusan dan tujuan penelitian serta tinjauan teoretis yang diajukan.

**JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SLTP/SLTA
KEPBER 0332/O/1992
NOMOR 381/1996**



Gambar 1.3 Alur Berpikir Penelitian

